

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 butir alenia ke empat menyatakan: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Dalam rangka menegahkan kedaulatan rakyat tersebut ialah lewat pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis. Pemilihan umum hasilnya adalah merupakan barometer sekaligus parameter sejauhmana rakyat menerjemahkan kehendaknya lewat pilihannya sesuai system pemilihan umum yang diperaktekan. Melalui pemilihan umum rakyat rakyat menentukan pilihannya secara bebas apakah setuju dengan praktek sistem kenegaraan yang sudah berlaku atau menghendaki perubahan yang mencakup badan legislative, eksekutif, dan yudikatif (Marbun, 2012).

Pelaksanaan Pemilu sangat menentukan nasib bangsa untuk masa selanjutnya, sehingga penyelenggaraannya harus benar-benar terorganisir dengan baik sesuai dengan asas pemilu tersebut dan dikelola orang-orang yang

bertanggung jawab serta memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas tinggi.

Dalam Praktek ketatanegaraan pengisian lembaga perwakilan lazimnya dilaksanakan melalui pemilu, meskipun di Indonsia untu pengisian lembaga perwakilan pernah menggunakan system campuran yakni sebagian dipilih dan sebagian diangkat. Namun setelah perubahan UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta kepala daerah dipilih dengan mekanisme pemilu (Ibnu,2009).

Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat atas sampai ketinggian paling bawah (pemilhan kepala desa) adalah tujuannya sama yaitu untuk menciptakan terwujudnya pemerintahan yang demokratis akan tetapi dalam kenyataan masih banyak hambatan dan rintangan yang terjadi. Orang-orang yang mencalonkan diri sebagai pemimpin tidak begitu sadar akan tanggung jawab yang mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat dan antusias masyarakat terhadap Pemilu menjadi berkurang.

Demokrasi dimana semua warga mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama dalam berperan serta dalam Pemilu menjadikan antusias masyarakat sangat besar untuk berpartisipasi dari mencalonkan diri sebagai Presiden samapai Kepala Desa. Yang menyebabkan terlalu banyaknya calon yang ikut serta dalam Pemilu menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat "pemilih". Masyarakat sangat sulit menentukan pilihan yang terbaik akan tetapi juga diimbangi dengan kemampuan seorang calon yang mempunyai visi dan misi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Masyarakat menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani karna mempunyai alasan sebagai warga Negara Indonesia, untuk mencari pemimpin, menyalurkan aspirasinya untuk memilih wakil rakyat langsung dan mengiginkan perubahan ekonomi yang lebih baik. Sebagian masyarakat tidak, menggunakan hak pilih karena beberapa faktor seperti tidak diberi tahu dan tidak mau tahu, tidak terdaftar sebagai pemilih, tidak menerima kartu pemilih dari panitia pemilu. Pemilih, berikap pasif, tidak memahami manfaat pemilu, ingin netral tidak senang berpolitik (Muhammad, 2008).

Ini merupakan jawaban dari aktualisasi isi UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan Negara berada di tangan rakyat sehingga penerapan pemilihan umum secara langsung merupakan cara untuk mengimplementasi kedaulatan rakyat tersebut atas Negara Indonesia.

Arief (1996: 120), berpendapat bahwa melalui sarana inilah rakyat melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, dan kalau perlu menentukan apakah mereka masih mau memiliki pemerintah yang sekarang sedang berkuasa.

Ada beberapa kecenderungan perilaku pemilih yang mulai mengedepankan sosiologis, psikologis, dan rasional ketimbang sentimen etnis. Ada semacam kejenuhan dan antipati yang kuat dalam sanubari masyarakat tiap kali pelaksanaan pemilu digelar, meski pun hal itu tidak bisa menjadi parameter bagi kemapanan berpolitik masyarakat Indonesia, sebab beragam perilaku memilih masyarakat masih terjadi dalam pemilu yang kesemua tidak di dasari oleh satu atau dua faktor, melainkan banyak faktor.

Reformasi politik harus dilakukan oleh semua kalangan, tidak hanya masyarakat, bukan juga pemerintah, karena hampir semua elemen saat ini sudah tidak lagi menghargai hakikat berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

Bismar (2011 : 56), berpendapat bahwa politik pragmatis yang semakin menguat, baik dikalangan politis maupun di sebagian masyarakat. Para politis hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji.

Sejak juni 2005, bangsa Indonesia memasuki babak baru berkaitan dengan penyelenggaraan tata pemerintahan di tingkat lokal. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur yang sebelumnya dipilih tidak langsung oleh DPRD. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengambilah hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah sehingga kehidupan demokrasi di tingkat lokal dan memicu timbulnya figure pemimpin yang professional, aspiratif, dan berdidikasih.

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak . penyelenggaraan pilkada serentak dilakukan secara bertahap, pilkada serentak pertama kali di gelar pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Selanjutnya pilkada serentak tahap kedua akan digelar pada februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Dan tahap ketiga pada juni 2018

digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Secara nasional pilkada serentak akan digelar pada tahun 2027, di 541 daerah.

Kabupaten Aceh Tenggara sendiri Sudah Enam kali melakukan pergantian Kepala Daerah (Bupati) mulai dari Lettu H. Syahadat tahun 1975-1981, T. Djohan Syahbudin, SH tahun 1981-1986, Drs. H. Iskandar tahun 1986-1991, Drs. H. Syahbudin BP tahun 1991-2001, H. Armen Desky tahun 2001-2006, dan Ir. H. Hasanuddin Broeh, M.M 2006 sampai sekarang.

Kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural dibanding aceh tengah (Aceh tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues) yakni didiami oleh lebih dari tiga suku yaitu, suku Alas sebagai suku tempatan di ikuti oleh suku-suku pendatang seperti suku singkil, aceh, karo, batak toba, gayo, jawa, minangkabau, mandailing, nias, dan suku aneuk jamee.

Menjelang Pemilihan kepala Daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada 15 Februari 2017 mendatang sudah ada dua pasangan Calon yang akan bersaing menjadi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Aceh Tenggara yaitu, Drs.Raidin Pinim, M.AP& Bukhari dengan nomor urut Satu dan H. Ali Basrah S,Pd &Denny Febrian Roza nomor urut dua.

Kabupaten Aceh Tenggara sendiri memiliki 388 gampong dari 16 Kecamatan, yaitu kecamatan babul makmur, babul ramah, babussalam, badar, bambel, bukit tusam, darul hasanah, deleng phokisen, ketambe, lawe alas, lawe bulan, lawe sigala-gala, lawe sumur, semadam, tanah alas, dan lauser. Pembahasan kali ini menguraikan bagaimana perkembangan pemilihan Kepala

Daerah di Indonesia Khususnya di Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017.

Kecamatan Badar adalah salah satu dari Kabupaten Aceh Tenggara, Kecamatan Badar memiliki 18 Desa yaitu, Desa salang Alas, Kute Pasir, Purwodadi, Kute Tinggi, Kampung Baru, Peranginan, Natam, Kumbang Jaya, Kumbang Indah, Natam Baru, Delem Megakhe, lawe Bekung, lawe Bekung Tampahan, Badar Indah, Batu Mberong, Tanah Merah, Tanoh Megakhe, dan Lawe Sekekah.

Desa Kampung Baru merupakan desa yang memiliki beragam latar belakang pendidikan, suku, dan agama. Mayoritas masyarakat di Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tersebut bukanlah suku Alas melainkan Suku Jawa/pendatang.

Hal lain yang membuat perilaku memilih masyarakat sangat urgen untuk diketahui adalah sejauh mana pendapat masyarakat terkait substansial pemilu dalam hidup mereka, melihat pemilihan kepala daerah tahun 2013 lalu masih banyaknya masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pilkada sehingga jumlah golongan putih (golput) semakin tahun semakin meningkat, sehingga melalui penelitian ini, penulis akan lebih spesifik menggali informasi terkait Perilaku Memilih Masyarakat Di Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2017 yang berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya pada pemilihan Kepala Daerah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di susun di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang timbul dari perilaku memilih dalam pemilihan Kepala Daerah Di Desa kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah sehingga jumlah golput semakin tahun semakin meningkat.
2. Masyarakat yang kurang dalam berpartisipasi politik khususnya dalam pemilihan kepala daerah.
3. Masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki beragam latar belakang dan kemudian berimbas pada perilaku memilihnya.

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk mempermudah dalam memahami substansi penelitian ini, penulis membatasi masalah dengan lebih spesifik mengulas tentang Perilaku memilih masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan kematangan pandangan politik yang terdapat dalam poin nomor empat dalam indentifikasi masalah.

## **D. Perumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah yang sustansial untuk dikaji dalam penelitian ini yakni, bagaimana perilaku memilih masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 di Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan pada dasarnya merupakan titik tujuan yang akan dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian yang akan dilakukan itulah sebabnya tujuan penelitian yang akan dilakukan harus mempunyai rumusan yang yang tegas, jelas, terperinci secara operasional.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data factual terkait perilaku memilih masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara, sebab perilaku memilih masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dapat menjadi tolak ukur bagi mana masyarakat mampu memainkan peran sebagai pemangku kedaulatan Negara Republik Indonesia.

### **F. Manfaat Penelitian**

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Inilah sifat pragmatis dari penelitian (Ilmu pengetahuan ilmiah). Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak yang antara lain:

1. Bagi penulis, Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih secara ilmiah dan akademis terkait perilaku memilih masyarakat Desa Kampung Baru Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2017.

2. Bagi Pemerintah manfaat dari penelitian ini tentu saja sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana masyarakat Indonesia mampu memainkan peran sebagai pemangku kedaulatan negara termasuk dalam hal pelaksanaan demokrasi secara langsung.
3. Bagi Masyarakat penelitian ini bermanfaat sebagai wahana untuk pendidikan politik dalam memelihara substansi tatanan berdemokrasi secara arif dan bijaksana sehingga cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kedaulatan negara di tangan rakyat dapat teraktualisasi dengan penuh martabat.
4. Perguruan Tinggi Sebagai bahan kajian maupun literatur dalam bidang Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.